



Perilaku Organisasi Pemerintah Desa Adodo Fordata Dalam Praktik Good Governance

Monica Feronica Bormasa
Universitas Lelemuku Saumlaki

*Corresponding Author's e-mail: mfbormasa@gmail.com

Article History:

Received: August 21, 2025

Revised: August 30, 2025

Accepted: August 31, 2025

Keywords:

organizational behavior,
village government, good
governance, Adodo Fordata
village

Abstract: *This article analyzes the organizational behavior of the Adodo Fordata Village government, located in Fordata District, in implementing the principles of good governance. The study employs a descriptive qualitative approach using interviews, observations, and documentation techniques. The findings indicate that the organizational behavior of village officials has been aligned with the principles of transparency, accountability, and participation, although several challenges remain, such as limited capacity of the officials, low participation from youth and women, and limited digital literacy among the community. These findings affirm that village governance is shaped not only by regulations but also by the organizational behavior fostered by the village apparatus.*

Copyright © 2025, The Author(s).

This is an open access article under the CC-BY-SA license



How to cite: Bormasa, M. F. (2025). Monica Perilaku Organisasi Pemerintah Desa Adodo Fordata Dalam Praktik Good Governance. SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah, 4(8), 1701–1708. <https://doi.org/10.55681/sentri.v4i8.4499>

PENDAHULUAN

Reformasi birokrasi di Indonesia telah mendorong perubahan tata kelola pemerintahan hingga ke tingkat desa. Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa memiliki kedudukan penting sebagai entitas pemerintahan yang otonom dengan kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Hal ini menuntut adanya tata kelola pemerintahan desa yang baik sesuai dengan prinsip *good governance*.

Prinsip *good governance* mencakup transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, responsivitas, efisiensi, keadilan, dan supremasi hukum. Penerapan prinsip ini di tingkat desa sangat dipengaruhi oleh perilaku organisasi aparatur pemerintah desa, mulai dari kepala desa, sekretaris desa, perangkat desa, hingga lembaga kemasyarakatan desa.(1)

Pemerintahan desa merupakan lembaga penyelenggara pemerintahan terdepan yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Desa memiliki kedudukan penting sebagai ujung tombak pembangunan karena menjadi entitas yang paling memahami kebutuhan warganya. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa memiliki kewenangan luas untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa, hak asal usul, dan adat istiadat setempat. Dengan kewenangan tersebut, pemerintah desa diharapkan mampu menyelenggarakan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat, sejalan dengan prinsip *good governance*.(2)

Dalam konteks Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Desa Adodo Fordata yang terletak di Kecamatan Fordata memiliki tantangan tersendiri dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Kondisi geografis kepulauan yang terpencil, keterbatasan akses transportasi, serta sumber daya manusia yang masih terbatas memengaruhi dinamika pemerintahan desa. Walaupun demikian, pemerintah Desa Adodo Fordata terus berupaya menjalankan program pembangunan dan pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat, misalnya pembangunan infrastruktur dasar, penyediaan air bersih, serta pengelolaan dana desa. Keberhasilan program-program tersebut tidak lepas dari perilaku organisasi aparatur desa yang menentukan efektivitas implementasi *good governance*.

Perilaku organisasi pemerintah desa mencerminkan pola komunikasi, gaya kepemimpinan, koordinasi internal, serta hubungan dengan masyarakat. (3) Aparatur desa yang memiliki perilaku kerja profesional, transparan, dan akuntabel akan lebih mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa, meningkatkan kepercayaan publik, serta menciptakan hubungan yang harmonis antara pemerintah desa dan masyarakat. Sebaliknya, perilaku organisasi yang kurang transparan, elitis, dan tidak partisipatif dapat menghambat proses pembangunan serta menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. (2,4) Hal ini menjadikan kajian tentang perilaku organisasi aparatur desa menjadi penting, terutama dalam mengukur sejauh mana praktik *good governance* telah dijalankan. (5)

Penelitian mengenai perilaku organisasi pemerintah desa dalam mewujudkan *good governance* di Desa Adodo Fordata relevan dilakukan karena dapat memberikan gambaran nyata mengenai keberhasilan maupun kendala yang dihadapi dalam tata kelola pemerintahan desa di wilayah kepulauan. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh masukan yang konstruktif bagi pemerintah desa dalam meningkatkan kinerja aparatur, memperkuat partisipasi masyarakat, serta mengembangkan inovasi pelayanan publik. Selain itu, hasil penelitian juga dapat menjadi referensi penting bagi pengambil kebijakan di tingkat kecamatan maupun kabupaten untuk memperkuat pembinaan dan pendampingan desa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan berkeadilan.

LANDASAN TEORI

Konsep perilaku organisasi merupakan dasar penting dalam memahami dinamika kerja aparatur desa. (Robbins, Judge, and Boston 2017) mendefinisikan perilaku organisasi sebagai studi sistematis mengenai tindakan individu dan kelompok dalam organisasi serta dampaknya terhadap efektivitas organisasi. Dalam konteks pemerintahan desa, perilaku organisasi tercermin melalui pola komunikasi, kepemimpinan, pengambilan keputusan, koordinasi internal, serta hubungan dengan masyarakat. Perilaku yang profesional, terbuka, dan akuntabel akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, sedangkan perilaku birokratis yang tertutup cenderung menimbulkan ketidakpuasan dan konflik sosial. (7)

Prinsip *good governance* merupakan kerangka normatif yang menekankan tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, responsif, serta berorientasi pada keadilan. UNDP (1997) merumuskan *good governance* sebagai proses pengelolaan kekuasaan, pembangunan, dan distribusi sumber daya secara efektif, transparan, dan partisipatif. Dalam konteks desa, prinsip ini menuntut aparatur untuk menjalankan tata kelola keuangan desa yang akuntabel, menyusun perencanaan pembangunan yang partisipatif, serta memberikan pelayanan publik yang merata bagi seluruh warga.

Penelitian (8) menegaskan bahwa implementasi good governance di desa mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat serta mempercepat pencapaian tujuan pembangunan lokal.

Selain itu, perilaku organisasi dalam pemerintahan desa dapat dipahami melalui teori kepemimpinan dan budaya organisasi. Kepemimpinan yang efektif adalah kemampuan untuk memengaruhi, mengarahkan, dan mengembangkan potensi kelompok dalam mencapai tujuan bersama.(9) Hal ini sangat relevan dengan konteks desa, di mana kepala desa berperan penting sebagai pemimpin sekaligus teladan dalam membangun budaya organisasi yang terbuka, jujur, dan berintegritas. Budaya organisasi yang baik akan memengaruhi perilaku aparatur desa sehingga selaras dengan prinsip-prinsip good governance.

Di sisi lain, teori partisipasi masyarakat juga penting untuk menjelaskan keterlibatan warga dalam tata kelola pemerintahan desa. (10) melalui konsep *ladder of participation* menegaskan bahwa partisipasi warga bukan sekadar hadir, tetapi harus sampai pada tingkat pengambilan keputusan bersama. Dalam konteks Adodo Fordata, partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa, pengawasan dana desa, dan pelaksanaan program pembangunan menjadi indikator utama tercapainya good governance. Dengan demikian, landasan teoritis ini menegaskan bahwa hubungan antara perilaku organisasi aparatur desa, kepemimpinan, budaya organisasi, dan partisipasi masyarakat merupakan faktor kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk memahami dan menggambarkan secara mendalam perilaku organisasi pemerintah desa dalam mewujudkan prinsip *good governance*. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman holistik tentang fenomena sosial yang terjadi di Desa Adodo Fordata, termasuk interaksi antara aparatur desa dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penelitian kualitatif efektif digunakan untuk mengungkap makna, pandangan, dan pengalaman para aktor dalam konteks sosial tertentu. Oleh karena itu, penelitian ini lebih menekankan pada pemahaman proses dan makna daripada sekadar angka atau data statistik.(11)

Lokasi penelitian ditetapkan di Desa Adodo Fordata, Kecamatan Fordata, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposif dengan pertimbangan bahwa desa ini memiliki karakteristik kepulauan, menghadapi keterbatasan akses, dan memiliki dinamika sosial yang khas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Subjek penelitian terdiri dari aparatur pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, serta perwakilan warga desa yang terlibat dalam musyawarah dan program pembangunan. Dengan melibatkan berbagai aktor, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai perilaku organisasi dalam pemerintahan desa.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Wawancara mendalam digunakan untuk menggali pandangan aparatur desa dan masyarakat mengenai praktik tata kelola pemerintahan desa. Observasi partisipatif dilakukan untuk melihat langsung interaksi dan pola kerja aparatur dalam menjalankan tugas, termasuk saat musyawarah desa maupun pelayanan publik. Sementara itu, studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah dokumen resmi seperti RPJMDes, APBDDes, laporan pertanggungjawaban, serta notulen rapat. Kombinasi ketiga

teknik ini memungkinkan peneliti untuk melakukan **triangulasi data** sehingga meningkatkan validitas temuan penelitian (12)

Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi informasi penting yang relevan dengan fokus penelitian, sedangkan penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif yang memudahkan pemahaman. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan dengan menghubungkan temuan di lapangan dengan teori perilaku organisasi dan prinsip *good governance*. (12)Keabsahan data diuji melalui teknik triangulasi sumber dan metode, pengecekan keabsahan dengan informan, serta keterlibatan peneliti secara langsung di lapangan.(13) Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan gambaran yang valid, reliabel, dan mendalam tentang perilaku organisasi pemerintah Desa Adodo Fordata dalam praktik *good governance*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perilaku Organisasi Aparatur Desa

Penelitian ini menemukan bahwa perilaku organisasi aparatur Desa Adodo Fordata secara umum masih didominasi oleh model kepemimpinan sentralistik, di mana kepala desa memegang peranan utama dalam hampir seluruh keputusan penting. Aparatur desa menjalankan tugas administratif sesuai pembagian kerja, tetapi koordinasi lintas bidang belum sepenuhnya berjalan secara sinergis. Kondisi ini menyebabkan alur kerja cenderung lambat ketika menghadapi persoalan yang membutuhkan penyelesaian cepat. (Robbins, Judge, and Boston 2017b) menekankan bahwa perilaku organisasi yang sehat harus didukung oleh komunikasi terbuka, kerjasama tim, serta sistem pengambilan keputusan yang partisipatif. Dalam konteks Adodo Fordata, masih terdapat gap antara peran formal perangkat desa dan praktik di lapangan, sehingga efektivitas organisasi belum optimal.

2. Transparansi dan Akuntabilitas

Transparansi pemerintahan desa telah dilaksanakan melalui forum musyawarah desa, papan informasi APBDes, dan penyampaian laporan pertanggungjawaban tahunan. Namun, hasil wawancara dengan masyarakat menunjukkan bahwa informasi keuangan desa sering disajikan dalam format yang sulit dipahami oleh warga yang memiliki keterbatasan literasi administrasi. Selain itu, pengawasan dari BPD belum maksimal, karena keterbatasan kapasitas anggota dalam membaca dan menganalisis laporan anggaran. (15) transparansi tidak hanya terkait keterbukaan informasi, tetapi juga bagaimana informasi tersebut dapat diakses, dipahami, dan ditindaklanjuti oleh masyarakat. Dengan demikian, Desa Adodo Fordata perlu memperbaiki mekanisme penyajian informasi agar lebih sederhana dan mudah dipahami warga, misalnya melalui infografis atau penjelasan dalam pertemuan public.

3. Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan dan Pengawasan

Keterlibatan masyarakat dalam musyawarah desa cukup tinggi, terutama ketika membahas pembangunan infrastruktur seperti jalan lingkungan, jembatan desa, dan sarana air bersih. Hal ini menunjukkan adanya kepedulian masyarakat terhadap pembangunan fisik yang dirasakan langsung manfaatnya. Namun, dalam aspek pengawasan penggunaan anggaran, partisipasi masyarakat masih rendah. Warga cenderung menyerahkan tanggung jawab penuh kepada kepala desa dan perangkatnya. Fenomena ini sejalan dengan teori *ladder of participation* dari (16) di mana tingkat partisipasi masyarakat di Adodo Fordata baru mencapai tingkat

konsultasi (*consultation*), belum sampai pada kemitraan sejati (*partnership*). Artinya, keterlibatan masyarakat masih bersifat formalitas dan belum mengarah pada pengambilan keputusan bersama serta kontrol terhadap kebijakan publik.

4. **Kepemimpinan dan Budaya Organisasi**

Kepala Desa Adodo Fordata dipandang memiliki kemampuan dalam mengelola konflik internal dan menjaga stabilitas organisasi desa. Namun, tantangan yang dihadapi adalah membangun budaya organisasi yang konsisten dengan nilai-nilai integritas, pelayanan, dan profesionalisme. Beberapa perangkat desa masih bekerja dengan orientasi administratif semata, belum sepenuhnya berorientasi pada pelayanan publik. Yukl (2019) menyebutkan bahwa kepemimpinan efektif tidak hanya mengandalkan instruksi, tetapi juga kemampuan menanamkan nilai-nilai organisasi yang mendorong perubahan perilaku positif. Oleh karena itu, penguatan budaya organisasi yang berbasis etika, keterbukaan, dan akuntabilitas sangat dibutuhkan agar perilaku aparatur desa benar-benar selaras dengan prinsip *good governance*.(17)

5. **Efektivitas Pelayanan Publik**

Dalam hal pelayanan publik, pemerintah Desa Adodo Fordata telah menyediakan layanan administrasi kependudukan dan surat menyurat secara rutin. Namun, beberapa warga menilai pelayanan masih lambat karena keterbatasan jumlah perangkat desa dan sarana kerja. Kondisi geografis desa yang tersebar juga menjadi hambatan dalam menjangkau semua warga dengan cepat. Penelitian Sari (2021) menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik di desa sangat bergantung pada profesionalitas aparatur serta dukungan fasilitas yang memadai. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur desa dan penyediaan sarana pelayanan menjadi kebutuhan mendesak untuk memperbaiki kualitas layanan publik.(18)

6. **Sinergi dengan Lembaga Desa dan Masyarakat**

Sinergi antara pemerintah desa, BPD, dan lembaga masyarakat (karang taruna, PKK, dan kelompok tani) di Adodo Fordata masih belum terbangun secara optimal. Program pembangunan sering kali dirancang tanpa melibatkan masukan dari lembaga-lembaga tersebut secara intensif. Padahal, sesuai prinsip *kolaboratif governance*, keterlibatan berbagai pihak dapat meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan. Hal ini sesuai dengan pendapat Dwiyanto (2018) yang menekankan bahwa keberhasilan tata kelola pemerintahan desa tidak hanya ditentukan oleh aparatur, tetapi juga oleh sejauh mana mereka mampu melibatkan aktor-aktor lain dalam proses pembangunan. (Wibawa, Dwiyanto, and 2018 n.d.)

7. **Implikasi terhadap Good Governance**

Secara umum, penelitian ini menemukan bahwa praktik *good governance* di Desa Adodo Fordata sudah berjalan, tetapi masih parsial dan belum konsisten di semua aspek. Transparansi dan partisipasi masyarakat sudah mulai diterapkan, tetapi akuntabilitas dan pengawasan masih menjadi titik lemah. Kepemimpinan kepala desa cukup berperan dalam menjaga stabilitas organisasi, tetapi budaya organisasi yang mendukung *good governance* masih perlu diperkuat.(20) Dengan mengacu pada kerangka UNDP (1997), Desa Adodo Fordata berada pada tahap transisi menuju pemerintahan desa yang lebih terbuka, partisipatif, dan akuntabel. Namun, agar dapat mencapai tata kelola yang baik secara menyeluruh, perlu adanya peningkatan kapasitas aparatur desa, mekanisme transparansi yang lebih komunikatif, serta strategi

pemberdayaan masyarakat agar lebih kritis dan aktif dalam mengawal pembangunan desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perilaku organisasi pemerintah Desa Adodo Fordata dalam praktik *good governance* menunjukkan kemajuan meskipun belum optimal. Pola kepemimpinan masih terpusat pada kepala desa, sementara koordinasi antarperangkat desa belum sepenuhnya berjalan efektif. Transparansi informasi dan komunikasi organisasi mulai diterapkan melalui musyawarah serta keterlibatan masyarakat, namun belum sepenuhnya mampu mendorong partisipasi aktif dalam proses pengawasan.

Budaya organisasi yang mendukung pelayanan publik telah tumbuh, tetapi konsistensi penerapannya masih lemah sehingga berpengaruh pada rendahnya akuntabilitas. Partisipasi masyarakat cukup tinggi dalam tahap perencanaan pembangunan, namun masih terbatas dalam aspek evaluasi dan kontrol sosial. Oleh karena itu, penerapan *good governance* di Desa Adodo Fordata perlu diperkuat melalui peningkatan kapasitas aparatur, penguatan mekanisme koordinasi, serta pemberdayaan masyarakat agar prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas dapat diwujudkan secara berkelanjutan.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Desa Adodo Fordata, Kecamatan Fordata, Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang telah memberikan izin serta dukungan dalam proses pengumpulan data penelitian ini. Apresiasi juga diberikan kepada para perangkat desa, tokoh masyarakat, dan warga Desa Adodo Fordata yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi, pandangan, serta pengalaman yang sangat berharga.

Penghargaan yang sama disampaikan kepada pihak akademisi dan rekan sejawat yang turut memberikan masukan selama penyusunan artikel ini. Penelitian ini tidak akan terlaksana tanpa bantuan, dukungan, dan kerjasama dari berbagai pihak.

DAFTAR REFERENSI

1. Indonesia WWPSN, 2025 undefined. TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA: EVALUASI KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI. sociohum.net [Internet]. [cited 2025 Aug 20]; Available from: <http://sociohum.net/index.php/PROSIDINGNASIOANAL/article/view/120>
2. Hariyanto R. KEDUDUKAN KEPALA DESA DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA. 2020 [cited 2025 Aug 20]; Available from: <https://repository.unja.ac.id/35133/>
3. Pendidikan YPPJI, 2017 undefined. Pengaruh Perilaku Kepemimpinan, Keadilan Organisasi Dan Keterlibatan Kerja Terhadap Organizational Citizenship Behavior Dosen. journal.unpak.ac.id [Internet]. 2017 [cited 2025 Aug 20];1:8–14. Available from: <https://journal.unpak.ac.id/index.php/pedagonal/article/view/221>
4. Syarief A, Manajemen D, Ekonomi F, Manajemen D, Pertanian I, Kampus B, et al. Pengaruh gaya kepemimpinan dan budaya organisasi terhadap komitmen organisasi

- dan perilaku kewargaan organisasi. journal.ipb.ac.id [Internet]. [cited 2025 Aug 20]; Available from: <https://journal.ipb.ac.id/index.php/jmo/article/view/22447>
5. Sari V, Riset DWJID, 2021 undefined. Transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa. jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id [Internet]. [cited 2025 Aug 20]; Available from: <https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/4108>
 6. Robbins SP, Judge TA, Boston Columbus Indianapolis New York San Francisco Amsterdam Cape Town Dubai London Madrid Milan Munich Paris Montreal Toronto Delhi Mexico City Sao Paulo Sydney Hong Kong Seoul Singapore Taipei Tokyo P. Essentials of organizational behavior. 2017 [cited 2025 Aug 20]; Available from: https://toc.library.ethz.ch/objects/pdf03/e01_978-1-292-09007-8_01.pdf
 7. Permata Sari I. Good governance and internal control on the prevention of fraud in the procurement of goods and services for government agencies. atlantispress.com [Internet]. 2021 [cited 2025 Aug 20]; Available from: <https://www.atlantispress.com/proceedings/first-t3-21/125970223>
 8. Sari D, Government NHJ of P and, 2021 undefined. Implementasi Program E-Retribsi Pasar sebagai Upaya Pemerintah Kota Semarang Mewujudkan Good Governance Tahun 2019. ejournal3.undip.ac.id DK Sari, NR Herawati *Journal of Politic and Government Studies*, 2021•ejournal3.undip.ac.id [Internet]. [cited 2025 Aug 20]; Available from: <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/31741>
 9. Jurnal HRJMAS, 2019 undefined. Kepemimpinan transformasional. download.garuda.kemdikbud.go.id [Internet]. [cited 2025 Aug 20]; Available from: <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3153450&val=11055&title=Kepemimpinan%20Transformasional>
 10. Nouban F, Abazid M. Plastic degrading fungi *Trichoderma viride* and *Aspergillus nomius* isolated from Nouban, F. and Abazid, M. (2017) 'Plastic degrading fungi *Trichoderma viride* and *Aspergillus nomius* isolated from local landfill soil in Medan', *Iopscience.Iop.Org*, 8(February . *IopscienceIopOrg* [Internet]. 2017 [cited 2025 Aug 20]; 8(February 2018):68–74. Available from: <http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/140/1/012115/meta>
 11. Fariq WM, Zamsiswaya Z, Tambak S. Telaah Kepustakaan (Narrative, Tinjauan Sistematis, Meta-Analysis, Meta-Synthesis) dan Teori (Kualitatif, Kualitatif, Mix Method). *Journal Social Society* [Internet]. 2022 Dec 31 [cited 2025 Aug 20]; 2(2):75–84. Available from: <https://pusdig.my.id/jss/article/view/264>
 12. methods JSTR reviewer's guide to mixed, 2021 undefined. Coding techniques for quantitative and mixed data. taylorfrancis.com [Internet]. 2021 Jun 30 [cited 2025 Aug 20]; 151–60. Available from: <https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9780203729434-14/coding-techniques-quantitative-mixed-data-johnny-salda%C3%B1a>
 13. Kalpokaite N, Radivojevic I. The Qualitative Report The Qualitative Report Demystifying Qualitative Data Analysis for Novice Qualitative Demystifying Qualitative Data Analysis for Novice Qualitative Researchers Researchers. [cited 2025 Aug 20]; 24:4–14. Available from: <https://nsuworks.nova.edu/tqr/vol24/iss13/5>
 14. Robbins SP, Judge TA, Boston Columbus Indianapolis New York San Francisco Amsterdam Cape Town Dubai London Madrid Milan Munich Paris Montreal Toronto Delhi Mexico City Sao Paulo Sydney Hong Kong Seoul Singapore Taipei

- Tokyo P. Essentials of organizational behavior. 2017 [cited 2025 Aug 20]; Available from: https://toc.library.ethz.ch/objects/pdf03/e01_978-1-292-09007-8_01.pdf
15. Rohman A, Santrian Hanafi Y. PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK.
 16. Hurlbert M, Gupta J. The split ladder of participation: A diagnostic, strategic, and evaluation tool to assess when participation is necessary. *Environ Sci Policy* [Internet]. 2015 Jun 1 [cited 2025 Aug 20];50:100–13. Available from: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1462901115000131>
 17. Bormasa, Feronica M. Kepemimpinan Dan Efektivitas Kerja. OSF Preprints [Internet]. 2022 Aug 25 [cited 2025 Aug 20]; Available from: <https://ideas.repec.org/p/osf/osfxxx/63jsn.html>
 18. Sari D, Government NHJ of P and, 2021 undefined. Implementasi Program E-Retribusi Pasar sebagai Upaya Pemerintah Kota Semarang Mewujudkan Good Governance Tahun 2019. *ejournal3.undip.ac.id* DK Sari, NR Herawati *Journal of Politic and Government Studies*, 2021•*ejournal3.undip.ac.id* [Internet]. [cited 2025 Aug 20]; Available from: <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/31741>
 19. Wibawa A, ... FDJ of P, 2018 undefined. Utilization Visualgo. net as a data structure learning media based on CDIO. *iopscience.iop.org* [Internet]. [cited 2025 Aug 20]; Available from: <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1028/1/012064/meta>
 20. Elahi KQI. UNDP on good governance. *Int J Soc Econ* [Internet]. 2009 Oct 16 [cited 2025 Aug 20];36(12):1167–80. Available from: <https://dx.doi.org/10.1108/03068290910996981>